

ANALISA PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA DESA DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN DI 11 KABUPATEN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sandy Kawulur¹, Rosalina A. M. Koleangan², Patrick C. Wauran³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email : sandykawulur061@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang mendesak dan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena terbilang cukup sulit untuk mengatasinya. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2015-2017. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data panel. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis adalah eviews8. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan yang ada di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara, variabel Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara, dan secara bersama-sama Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai upaya meningkatkan pendapatan maka Pemerintah di 11 Kabupaten Sulawesi Utara kedepan adanya perbaikan dalam proses pengambilan sektor pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, agar terjadi peningkatan pendapatan. Dalam Dana Desa di harapkan pemerintah akan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan terlebih khusus masyarakat di pedesaan.

Kata kunci : pendapatan asli daerah (PAD), dana desa (DD), kemiskinan

ABSTRACT

Poverty is an urgent national problem and one of the fundamental problems that is the center of attention of the government because it is quite difficult to overcome. Poverty is a condition where there is an inability to meet basic needs such as food, clothing, shelter, education, and health. Poverty can be caused by the scarcity of means to fulfill basic needs, or the difficulty of access to education and employment. This study aims to analyze and determine the effect of Regional Original Income and Village Funds in Reducing Poverty Levels in 11 Districts of North Sulawesi Province. The data used in this study are secondary data in 2015-2017. The analytical tool used is panel data analysis. The software used to do the analysis is eviews8. The results showed that the Regional Original Revenue variable had a positive and significant effect on the Poverty Rate in 11 Districts of North Sulawesi Province, the Village Fund variable had a negative and significant effect on the Poverty Rate in 11 Districts of North Sulawesi Province, and together the Regional Original Revenue Variable and Village Funds affect the Poverty Rate in 11 Districts of North Sulawesi Province. In an effort to increase revenue, the Government in 11 districts of North Sulawesi in the future there will be improvements in the process of taking the sector of local tax revenue, regional levies, the results of regionally owned companies and other legitimate Regional Original Revenues, so that there is an increase in revenue. In the Village Fund, it is hoped that the government will be more effective and efficient in the use of the budget so that it can reduce poverty especially in rural communities.

Keyword : regional original income (PAD), village funds (DD), poverty

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang mendesak dan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena terbilang cukup sulit untuk mengatasinya. Terkadang ada kalanya suatu kemiskinan harus benar-benar terjadi karena adanya suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin misalnya krisis ekonomi, juga gaya hidup dan budaya yang justru mengakibatkan masyarakat Indonesia itu menjadi miskin. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan. Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan yang mengacu pada dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Pasalnya, banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Selain itu, perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat perdesaan (Bank Dunia, 2000).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari, dengan batasan ini maka diperkirakan pada 2001, 1 miliar orang di dunia mengonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang di dunia mengonsumsi kurang dari \$2/hari." Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan \$1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari \$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut

Prinsip otonomi daerah pada dasarnya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Pemerintah Daerah harus mampu menganalisis kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier dengan mengedepankan kebermanfaatannya untuk rakyatnya.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya (Halim, 2001).

Pendapatan Asli Daerah yang di terima oleh pemerintah daerah menggambarkan tingkat kesiapan daerah mengelola daerahnya. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar anggaran belanja terutama dalam pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat. Menurut Santosa (2003) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan daerah. Semakin baik daerah dalam mengelola potensi daerahnya maka semakin tinggi pendapatan yang diterima sehingga daerah tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada.

Menurut Mardiasmo (2004: 96), kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua

hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yang berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Desa sebagai daerah otonom yang berada pada tingkatan terendah secara otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah di mulai dari level pemerintahan terendah. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa, Misalnya: pertama, desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai pendapatan asli desa (PADesa) yang tinggi. Ketiga, masalah itu di ikuti oleh rendahnya dana oprasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat (Bambang, Hudayana, 2015 dalam Jusman 2016).

Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan). Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidak seimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh. Menurut Edy Suandi Hamid (2008) seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran pengertian kemiskinan dengan tidak melihat aspek pendapatan dan konsumsi saja, tetapi juga melihat masalah ketergantungan, harga diri, kontinuitas pendapatan dsb.

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective (Bappenas, 2004).

Ravallion (1998) Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk, sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”. Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (official figure) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya,

banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia (Ravallion, 1998).

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. BPS (2008), mendefinisikan kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum yang dibutuhkan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS (2009), mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah minimum non makanan yang merupakan dasar seseorang yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan) standar pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (UNDP, 1990).

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, penggali pasir dan mereka yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural ini adalah pemerintah, karena pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin, jikapun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan. Sehingga tidak ada masyarakat miskin yang 'naik kelas', artinya jika pada awalnya buruh, nelayan, pemulung maka selamanya menjadi buruh nelayan dan pemulung, karena tidak ada upaya dalam menaikkan derajat dan kemampuan mereka baik itu dalam kesempatan pendidikan atau pelatihan.

Kemiskinan Kultural merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Ciri dari kebudayaan kemiskinan ini adalah masyarakat enggan mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-lembaga utama, sikap apatis, curiga, terdiskriminasi oleh masyarakat luas. Dalam komunitas lokal ditemui ada rumah yang bobrok, penuh sesak dan bergerombol. Ditingkat keluarga, masa kanak-kanak cenderung singkat, cepat dewasa, cepat menikah. Pada individu mereka ada perasaan tidak berharga, tidak berdaya dan rendah diri akut. Pandangan lain tentang budaya kemiskinan adalah, bahwa kebudayaan kemiskinan merupakan efek domino dari belenggu kemiskinan struktural yang menghinggap masyarakat terlalu lama, sehingga membuat masyarakat apatis, pasrah, berpandangan jika sesuatu yang terjadi adalah takdir, dalam konteks keagamaan disebut dengan paham Jabariah, terlebih paham ini disebarkan dan di doktrinasikan dalam mimbar agama. Contoh kemiskinan ini ada pada masyarakat pedesaan, komunitas kepercayaan atau agama, dan kalangan marginal lainnya.

Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (local self-government) adalah kabupaten dan kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Badrudin, 2011).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sjafrizal, 2014).

2. Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dana Desa

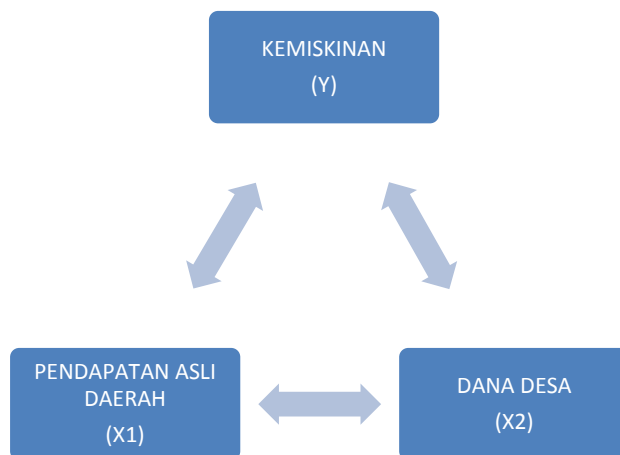
Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri yaitu pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam desa terdapat pemerintah desa yang sering disebut Kepala desa serta perangkat-perangkat desa bersangkutan. Pemerintahan desa juga sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Urusan urusan yang diselenggarakan diantaranya tentang pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa. Dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kebutuhan yang saat ini diperlukan masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Adanya BUMDes ini membuat desa lebih tertata secara pendapatan rutin yang diperoleh dan diperuntukan untuk sebagaimana mestinya. Tujuan penataan desa juga tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 ayat 1, yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan meningkatkan daya saing desa.

Menurut Mardiasmo (2004: 96), kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yang berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Desa sebagai daerah otonom yang berada pada tingkatan terendah secara otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



2. METODE PENELITIAN

Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang akan digunakan adalah Analisis Regresi Berganda Model Panel Data. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Microsoft Excel 2013* dan *Eviews 0.8*.

Persamaan model sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

Dimana :

- Y = Kemiskinan
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X₂ = Dana Desa (DD)
- α = Intercep
- e = Standart error

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari uji spesifikasi, maka model sebaiknya menggunakan estimasi dengan efek tetap (*fixed effect*). Pada pengujian sebelumnya, model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil estimasi konsisten dan tidak bias.

a. Uji t-statistik

Tabel 3.1
Hasil Uji t Berdasarkan Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-24.15614	21.99329	-1.098341	0.2851
X1	3.299131	1.292958	2.551614	0.0190
X2	-1.184539	0.238945	-4.957359	0.0001

Sumber : data diolah *eviews 08*

Hasil Uji t terhadap parameter X_1 . Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : $\beta = 0$, variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) tidak mempengaruhi variabel Tingkat ` Kemiskinan (Y)

H_1 : $\beta \neq 0$, variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) mempengaruhi variabel Tingkat Kemiskinan Y

Karena probabilitas Pendapatan Asli Daerah (X_1) $< \alpha$ ($0.0190 < 0.05$) maka variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) signifikan pada α 5% dan variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh terhadap Kemiskinan, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Berarti secara Parsial variabel independen Pendapatan Asli Daerah (X_1) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Sulawesi Utara. Persamaan regresi menunjukkan angka positif untuk koefisien Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan hal ini tidak sesuai dengan harapan teoritik bahwa rata-rata lama pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja. nilai koefisien β_1 sebesar -2.241 artinya hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) negatif atau tidak signifikan pada ($\alpha= 0,005$). (Agus Widarjono, 2013).

Hasil Uji t terhadap Parameter X_2 . Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : $\beta = 0$, variabel Dana Desa (X_2) tidak mempengaruhi variabel Tingkat Kemiskinan (Y)

H_1 : $\beta \neq 0$, variabel Dana Desa (X_2) mempengaruhi variabel Tingkat Kemiskinan (Y)

Karena probabilitas Dana Desa (X_2) $< \alpha$ ($0.0001 < 0.01$) maka variabel Dana Desa (X_2) signifikan pada α 1% dan variabel Dana Desa (X_2) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y), maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Berarti secara Parsial variabel independen Dana Desa (X_2) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Sulawesi Utara.

b. Uji F-statistik

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara menyeluruh (bersama-sama).

Tabel 3.2
Hasil Uji F Berdasarkan Estimasi *Fixed Effect Model*

R-squared	0.998153	Mean dependent var	13.85364
Adjusted R-squared	0.997045	S.D. dependent var	6.872507
S.E. of regression	0.373605	Akaike info criterion	1.155870
Sum squared resid	2.791619	Schwarz criterion	1.745403
Log likelihood	-6.071857	Hannan-Quinn criter.	1.354230
F-statistic	900.6789	Durbin-Watson stat	2.310243
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah eviews 08

Hipotesis:

H_0 : $\beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ variabel independen tidak berpengaruh

H_1 : $\beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ variabel independen berpengaruh

Dari hasil estimasi :

Probabilitas (F-statistic) = 0.000000

$\alpha = 1\% = 0.01$

probabilitas $< \alpha$ ($0.000000 < 0.01$) maka model signifikan 10% dan menolak H_0 , maka model layak sehingga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Perhitungan dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 .

Tabel 3.3
Hasil Koefisien Determinasi Berdasarkan Estimasi
Fixed Effect Model

R-squared	0.998153
Adjusted R-squared	0.997045
S.E. of regression	0.373605
Sum squared resid	2.791619
Log likelihood	-6.071857
F-statistic	900.6789
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : data diolah eviews 08

Dari hasil estimasi:

$$R\text{-squared} = 0.998153$$

Artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 99% sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan variabel lain diluar model.

d. Interpretasi Hasil

Menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen dilihat dari koefisien.

Tabel 3.4
Hasil Hasil Koefisien Berdasarkan Estimasi
Fixed Effect Model

Variable	Coefficient
C	-24.15614
X1	3.299131
X2	-1.184539

Sumber : data diolah eviews 08

Dari hasil estimasi :

Koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Pendapatan Asli Daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan. Ketika Pendapatan Asli Daerah naik 1% maka jumlah Tingkat Kemiskinan yang dikeluarkan juga ikut meningkat sebanyak 3.29%.

Koefisien Variabel Dana Desa (X_2), Dana Desa secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Dana Desa. Ketika Dana Desa naik 1% maka Tingkat Kemiskinan menurun sebanyak 1.18 %.

Pembahasan

Berdasarkan dari hasil pemilihan model yang paling tepat serta analisis regresi yang telah dilakukan, maka akan dijelaskan secara terperinci mengenai uji hipotesis yang telah dilakukan

sebelumnya. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai perbedaan yang ada dari hasil penelitian ini terhadap penelitian yang menjadi dasar atau rujukan dari penelitian ini. Berikut ini adalah penjelasan dari tiap hipotesis yang telah diuji diatas.

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan Pendapatan Asli Daerah adalah 3,299 sementara t-hitung nya adalah 2,551 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.019 kurang dari 5% ($p < \alpha$) sehingga secara statistik variabel Pendapatan Asli Daerah signifikan mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (H_0 ditolak dan menerima H_1) maka model estimasi *Fixed Effect*, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Daerah Sulawesi Utara.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan dugaan hipotesis yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dan dialokasikan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatannya seperti belanja daerah, pembangunan daerah dan melengkapi sarana prasarana daerah guna memenuhi pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah. Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Devito (2017), dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Empiris Pada Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015)” Hasil pengujian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dan tidak sesuai dengan harapan teoritis antara Pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Kemiskinan.

Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan Dana Desa adalah -1,184 sementara t-hitung nya adalah -4,957 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0,0001 kurang dari 1% ($p < \alpha$) sehingga secara statistik variabel Dana Desa signifikan mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (H_0 ditolak dan menerima H_1) maka model estimasi *Fixed Effect*, Dana Desa berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Daerah Sulawesi Utara.

Hasil tersebut sama dengan dugaan hipotesis yang menyebutkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan. Koefisien sebesar -1,18, memberikan indikasi jika setiap penambahan 1% Dana Desa, maka akan menurunkan kemiskinan desa sebesar 1,18%. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Intan Mala Sari (2017), dengan judul “Analisa Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung” yang menyatakan bahwa Dana Desa dan ADD efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan desa pada 13 desa di Kabupaten Tulungagung.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan model estimasi *Fixed Effect* positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan yang ada di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara.
2. Dana Desa dengan model estimasi *Fixed Effect* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara.

3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa dengan model estimasi *Fixed Effect* secara bersama-sama mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

1. Dengan hasil penelitian ini, maka harapan untuk Pemerintah di 11 Kabupaten Sulawesi Utara kedepan adanya perbaikan dalam proses pengambilan sektor pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, agar terjadi peningkatan pendapatan. Dalam Dana Desa di harapkan pemerintah akan lebih afektif dan efisien dalam penggunaan anggaran sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan terlebih khusus masyarakat di pedesaan.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap Pemerintah di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara dalam mengkaji dan menetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pemanfaatan Dana Desa dalam mengurangi Tingkat Kemiskinan.
3. Kepada Peneliti selanjutnya kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amos O.M. Jr. (2014). in his research Evidence of Increasing Regional Income Variation in the United States: 1969-2006.
- Ansofino, Jolianis, Yolamalinda, & Arfilindo, H. (2016). Buku Ajar Ekonometrika. Yogyakarta: Deepublish.
- Basuki. (2016). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS. Depok : PTRajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta
- Meilita. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013) Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No 02. Tahun 2016.
- Muhammad E. (2017). Dalam penelitiannya Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo.
- Muhammad.A. (2017). Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa, ReD Post Press, Pekanbaru.
- Novindra. (2017). dalam penelitiannya Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- Santosa A. (2003). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta.
- Simangunsong F. and Wicaksono S. (2017). *Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District)*.
- Widarjono A. (2013). "*Ekonometrika : Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*". Yogyakarta : Ekonisia FE UII.
- Widarjono A. (2013). Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya, Ekonosia, Jakarta.
- Widarnawati B.W. Santoso B. and Suparman L.(2018). *Factors Affecting of Village Financial Management and Its Implications for Stakeholders Trust (Study on Vilages In Central Lombok, Iindonesia)*.
- World Bank.** (2000). *Global Poverty Report*.